

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA OLEH BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Fitri Nur Awalliyah¹, Aan Anwar Sihabudin², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: fitrinurawalliyah1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih belum optimalnya Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah dikarenakan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang belum memadai Berdasarkan latar belakang tersebut, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 5 orang informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan (wawancara & observasi) dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berjalan optimal. 2) Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Ciamis yaitu, minimnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang belum memadai, serta minimnya fasilitas penunjang pengembangan destinasi pariwisata. 3). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan yang timbul dalam Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Ciamis adalah mengikuti ragam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyediakan kembali sumber daya finansial yang cukup untuk Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, membangun fasilitas penunjang pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci : *Implementasi, Program, Pengembangan*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan destinasi pariwisata diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi pembangunan ekonomi. Dalam

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk tingkat Nasional, rencana induk tingkat Provinsi, dan rencana induk tingkat Kabupaten/

Kota rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut kemudian diatur dengan peraturan daerah dan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan dan menyelenggarakan sepenuhnya kebijakan dan program pembangunan di wilayahnya. Sistem otonomi daerah yang diterapkan saat ini mengharuskan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan harus mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pembangunan (fisik dan ekonomi).

Dalam perkembangannya, dunia pariwisata telah mengalami banyak perubahan, baik perubahan bentuk, pola dan sifat kegunaan, cara berpikir dan dorongan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.

Melihat prospek perkembangan pariwisata yang sangat menjanjikan, maka dari sudut pandang ekonomi, daerah harus mampu mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi dan lain-lain. Dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah dituntut adanya perubahan persiapan dan kebijakan di masing-masing sektor (termasuk sektor pariwisata), serta dituntut kesiapan baik mengenai sikap,

kapasitas, serta kapabilitas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini data primerdata yang langsung dan segera dapat diperoleh dari sumbernya, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari kuisisioner yang digunakan dan diisi oleh responden. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Pegawai Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis, dan 5 orang masyarakat pengelola objek wisata. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (dalam Agustino 2012:7) mendefinisikan “kebijakan publik adalah yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.” Sedangkan menurut Carl I. Federick (dalam Nugroho 2009: 93-94) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan

tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang selaras dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengertian Implementasi

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Sebagaimana dikemukakan dalam kamus Webster (Wahab, 2012:135) bahwa:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Implement*. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Widodo (2013:88) meyakini bahwa: “Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Kemudian Agustino (2017:139) mengemukakan bahwa: “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan memiliki cakupan pengertian yang sangat luas. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian kebijakan sesuai dengan pandangan masing-masing. Anderson (Abdoellah dan Rusfiana, 2016:16) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”.

Sedangkan Fredrich (Widodo, 2013:13) menyatakan bahwa: “Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Kemudian Dye (Widodo, 2013:12) mengemukakan definisi kebijakan publik bahwa “*whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu)”. Sejalan dengan definisi kebijakan publik tersebut, Subarsono (2020:2) menyatakan: “Kebijakan publik mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo”.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapatdiketahui bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasamaguna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Wahab, 2015:135) menyatakan bahwa : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat/ kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Implementasi Program

Dari implementasi kebijakan muncul suatu program untuk mengatasi premasalahan. Program-program yang sifatnya operasional isinya mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Selain berisi kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, secara terperinci program menggambarkan mengenai alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode prosedur kerja yang harus ditempuh dan juga kejelasan standar yang menjadi pedoman. Gordon (dalam Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “Implementasi

berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”

Pengertian Pengembangan

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, fasilitas penunjang pariwisata, melakukan promosi, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para pelaku pariwisata. Menurut Sumiatio (2010:49) menyatakan bahwa :

Pengembangan berasal dari kata dasar *kembang* yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan *pe-* dan *-an* sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan.

Pengertian Destinasi Pariwisata

Didalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa destinasi merupakan kata benda yang berarti lokasi / tempat tujuan ataupun tempat tujuan pengiriman. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan suatu tempat signifikan yang akan dituju ketika seseorang dalam perjalanan.

Menurut Damanik dan Weber (2006) pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang.

Sedangkan menurut Damanik (2006:1) sebagai berikut : “ Pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya”.

Dari uraian di atas bahwa pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.

Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis

Untuk mengembangkan destinasi pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan, tertera pada Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor 37 Tahun 4 2007 Tentang Kriteria dan Penerapan Destinasi Pariwisata Unggulan, bahwa yang menjadi kriteria penetapan destinasi unggulan sekurang-kurangnya, adalah:

1. Ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata;
2. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
3. Aksesibilitas;
4. Kesiapan dan Keterlibatan masyarakat;
5. Potensi pasar; dan
6. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah; .

Selain itu, tugas, fungsi dan tata kerja dinas juga merupakan salah satu kunci dalam mensukseskan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Ciamis. seperti yang telah tercantum dan disusun dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 29 tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

1) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dicapai oleh para pelaksana

Berdasarkan hasilobservasi, peneliti menganalisa bahwa dalam implementasi program pengembangan destinasi pariwisata Badan Promosi Pariwisata daerah sudah bekerja dengan berusaha menjalankan SOP nya, namun pada melaksanaannya belum maksimal.

Dalam suatu organisasi penerapan SOP merupakan suatu keharusan dengan dikeluarkannya peraturan dari Menteri Pemerintah dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam hal pemerintahan SOP memiliki manfaat

untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, maka penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangatlah penting untuk mengukur sejauh mana implementasi program pengembangan destinasi pariwisata telah dilaksanakan. Pada kenyataannya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum optimal dilihat dari kinerjanya yang kurang efektif dan efisien. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pegawai mengenai apa yang dijadikan standar sebagai acuan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil analisis saya bahwa sumber daya manusia yang dimiliki untuk melaksanakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki kekurangan dan kelebihan, terutama bila dikaitkan dengan bidang keahlian dalam hal ini kepariwisataan masih sangat terbatas, dan hanya memaksimalkan yang sudah ada.

2) Sumber Daya Finansial

Berdasarkan hasil analisa saya, pada sumber daya finansial masih memiliki kekurangan namun karena disesuaikan kembali dengan APBD jadi hanya memaksimalkan yang sudah ada.

Begitu pula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata

terkendala dengan anggaran dibuktikan dengan belum meratanya pembangunan sarana prasarana serta fasilitas objek wisata sehingga kurang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Ciamis. Selain dalam anggaran, Badan Promosi Pariwisata Daerah juga terkendala dalam sumber daya manusia pariwisata, sumber daya manusia yang berkompeten dan sesuai dengan bidang keahliannya, hal tersebut dapat menghambat dalam implementasi pengembangan destinasi pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah masih memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sehingga untuk melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata masih belum optimal. Kegiatan promosi pariwisata memiliki peran penting untuk mengkomunikasikan suatu objek wisata agar dikenal masyarakat dan yang akhirnya akan menarik wisatawan untuk berkunjung.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

1) Organisasi Formal dan Informal

Berdasarkan hasil observasi menemukan bahwa komitmen internal pada diri pegawai masih minim dan upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan kembali sumber daya manusia agar menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa komitmen eksternal yang dibentuk oleh

lingkungan kerja menunjukkan hasil yang positif terbukti hingga dibebankannya sebuah kebijakan atau program pada Badan Promosi Pariwisata Daerah yang artinya dipercaya karena lingkungan kerjanya mendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Namun komitmen pada diri pegawai yang sering berubah ubah membuat pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata berjalan belum efektif sehingga memerlukan pemberdayaan untuk mengembalikan motivasi pegawai agar bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan.

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan- Kegiatan Pelaksana

1) Adanya Komunikasi dan Koordinasi Antara Organisasi Terkait

Berdasarkan hasil analisa saya bahwa komunikasi dan koordinasi antara agen pelaksana atau dalam hal ini *implentators* sangat penting untuk senantiasa harmonis dan selaras karena untuk mewujudkan program pengembangan destinasi pariwisata memerlukan kerjasama yang baik. Dilihat dari begitu banyaknya potensi destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ciamis tentu saja memerlukan dukungan dari organisasi terkait.

2) Tersedianya Alat/ Media Komunikasi Informasi

Media informasi komunikasi memiliki peran dalam mewujudkan implementasi program pengembangan

destinasi pariwisata apabila dalam penggunaannya dilakukan secara maksimal.

e. Sikap Para Pelaksana

1) Pandangan Terhadap Kebijakan

Program pengembangan destinasi pariwisata ini dibuat semata mata karena Kabupaten Ciamis memiliki banyak potensi pariwisata yang perlu untuk dikembangkan, dalam perkembangannya memerlukan kekompakan dan keselarasan antara agen pelaksana.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

1) Dimensi Ekonomi

Pengembangan destinasi pariwisata diperlukan adanya dukungan dimensi berupa berkembangnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

2) Dimensi Sosial

Berdasarkan dari hasil wawancara, saya menganalisis bahwa inti dari tujuan program pengembangan destinasi pariwisata adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar objek pariwisata, namun dalam pelaksanaannya BPPD masih belum optimal dalam hal mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

3) Dimensi Politik

Implementasi program pengembangan destinasi pariwisata belum tercapai dapat ditandai dengan masyarakat belum menerima manfaat yang nyata secara langsung. Karena

prosesnya yang tidak instan jadi memerlukan kesabaran dan konsistensi dari agen pelaksana sehingga dapat tercapai kualitas hidup masyarakat yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa :

Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah dilaksanakan namun kurang optimal. Hal ini dibuktikan bahwa menurut hasil penelitian belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkompeten dan sesuai dengan bidang keahliannya guna melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata. Upaya yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan mengikuti ragam pelatihan yang disediakan oleh kementerian atau pihak swasta. Kurangnya sumber daya finansial yang dianggarkan untuk program pengembangan destinasi pariwisata sehingga belum optimal, dilihat dari promosi sarana dan prasarana yang menunjang kepariwisataan belum memadai. Seharusnya pariwisata sebagai *leading sector* perekonomian daerah memiliki dana seluas-luasnya

tetapi tidak bisa seperti itu karena disesuaikan kembali dengan APBD yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam menjalankan tugasnya telah berkomitmen dan bertanggung jawab dengan adanya laporan dan evaluasi pertanggung jawaban setiap akhir tahun. Komunikasi dan koordinasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini sebagai mitra kerja berjalan dengan baik dan harmonis namun belum optimal, dilihat dari kurang intensif nya rapat koordinasi. Seharusnya terjalin rapat koordinasi yang rutin untuk membicarakan apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan yang dihadapi dalam Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ini. Komunikasi dan koordinasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Ciamis pun terlihat belum optimal dilihat dari organisasi Kelompok Sadar Wisata hanya beberapa daerah saja yang aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Damanik, Janianton dan Weber,

Helmut. F., (2006) *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta : Pusbar UGM & Andi Yogyakarta.

Nugroho. (2009). *Pengaruh Kemacetan Lalu Lintas Terhadap. Perkembangan Keparawisataan Kota Bandung*. Bandung: Program Studi.

Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor 37 Tahun 4 2007 Tentang Kriteria dan Penerapan Destinasi Pariwisata Unggulan

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, Teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab Solichin, (2012), *Analisis Kebijakan: Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Weber, Helmut F. (2006). *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta : Pusbar Ugm & Andi Yogyakarta

Widodo. (2013). *Pengukuran Kerja*. Yogyakarta : Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.